



# Strategi Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Penguatan Urban Farming dan Ketahanan Pangan

Eliza\*

<sup>1</sup>Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung, Indonesia

e-mail correspondence\*: [elizadeny99@gmail.com](mailto:elizadeny99@gmail.com)

History Article	Abstract
Received: 20 February 2026 Revised: 19 March 2026 Accepted: 21 April 2026	Urban food security in Bandar Lampung City faces increasingly complex challenges due to the high dependence of households on market supplies, food price fluctuations, distribution disruptions, an increase in the urban population, and the existence of priority food-vulnerable areas. This study aims to analyze the Bandar Lampung City Government's policy strategy in strengthening urban farming as an instrument of urban food security, identify priority issues, evaluate policy alternatives, and formulate integrated policy recommendations. This study uses a qualitative-descriptive approach based on policy analysis by utilizing secondary data from the Central Bureau of Statistics, the Food Security and Vulnerability Atlas, regional government documents, related regulations, and relevant scientific literature. The analysis is carried out through problem identification, priority determination using the urgency, seriousness, and growth method, the avoid-shift-improve strategic framework, and evaluation of four policy alternatives based on economic, social, political, and technical aspects. The results show that the main problems of food security in Bandar Lampung are the high dependence of households on markets for fresh commodities, the suboptimal implementation of yard-based and community-based urban farming, and the weak integration of urban farming with the city's food security policy. Of the four alternatives analyzed, integrating urban farming with city food security policies is the most strategic option because it best aligns with real-world regional conditions, institutional support, food inflation pressures, and the need for priority-area-based interventions. This study concludes that urban farming needs to be positioned as a cross-sectoral public policy supported by regulations, coordination between regional agencies, community assistance, and measurable performance indicators. The implications of this study emphasize the need for the Bandar Lampung City Government to develop urban farming as a sustainable urban food security strategy to strengthen access to fresh food, reduce household vulnerability, support food inflation control, and strengthen the socio-economic resilience of urban communities.
<b>Keyword</b> Bandar Lampung; Food Inflation; Public Policy; Urban Food Security; Urban Farming	

**To cite this article:** Eliza, E. (2026). *Strategi Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Penguatan Urban Farming dan Ketahanan Pangan*. *Kenduri: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*. 6(1) 2026, Hal: 155-166. <https://doi.org/10.62159/kenduri.v6i1.xxx>

## PENDAHULUAN

Ketahanan pangan perkotaan menjadi salah satu isu strategis dalam tata kelola pembangunan daerah karena kota semakin bergantung pada sistem pasokan pangan yang panjang, mekanisme pasar yang fluktuatif, serta daya beli rumah tangga yang tidak merata. Dalam konteks global, kerawanan pangan tidak hanya dipahami sebagai persoalan kurangnya produksi pangan, tetapi juga sebagai masalah akses,

keterjangkauan, kualitas konsumsi, stabilitas harga, dan ketahanan sistem pangan terhadap gangguan ekonomi, iklim, maupun distribusi (Engler-Stringer, 2023; Nations et al., n.d.; Pérez-Escamilla, 2024). SOFI 2025 menekankan bahwa inflasi harga pangan melemahkan daya beli dan membatasi akses kelompok berpendapatan rendah terhadap pangan sehat, sementara FAO *Food Price Index* menunjukkan harga komoditas pangan global tetap menjadi indikator penting bagi stabilitas pangan lintas negara (FAO, IFAD, UNICEF, 2025; FAO, 2025; Saada Reuveni, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan kota perlu dianalisis melalui perspektif sistem pangan yang lebih luas, yaitu bagaimana pangan diproduksi, didistribusikan, diakses, dikonsumsi, dan dikelola dalam ruang perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan, kepadatan penduduk, serta ketimpangan sosial-ekonomi (Chen & Yu, 2024; Haile Aboye et al., 2024; Lundberg et al., 2025).

Dalam kajian ketahanan pangan, definisi yang banyak digunakan menempatkan ketahanan pangan sebagai kondisi ketika setiap orang, setiap saat, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan sesuai kebutuhan hidup sehat. Kerangka ini menegaskan empat dimensi utama, yaitu ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan (Galanakis et al., 2025; Pérez-Escamilla, 2024; Sumsion et al., 2023). Pada wilayah perkotaan, dimensi akses dan stabilitas menjadi sangat krusial karena rumah tangga pada umumnya tidak memproduksi pangan sendiri, melainkan bergantung pada pasar, jaringan distribusi, serta harga komoditas harian (Colson-Fearon & Versey, 2022; Dumisa et al., 2025; Touch et al., 2024). Ketika harga beras, sayuran, cabai, bawang, minyak goreng, telur, atau protein hewani mengalami kenaikan, rumah tangga miskin dan rentan cenderung menyesuaikan konsumsi dengan mengurangi kualitas, kuantitas, atau keragaman pangan yang dikonsumsi (Antriyandarti et al., 2023; Bird et al., 2023; Herawati et al., 2025). Oleh karena itu, kebijakan ketahanan pangan perkotaan tidak dapat hanya berorientasi pada ketersediaan pasokan di pasar, tetapi juga harus memperkuat kapasitas rumah tangga dan komunitas dalam mengakses pangan sehat secara lebih stabil dan terjangkau.

Urban farming atau pertanian perkotaan muncul sebagai salah satu instrumen kebijakan yang relevan untuk merespons kerentanan tersebut. Urban farming tidak hanya merujuk pada aktivitas menanam di pekarangan, lahan kosong, sekolah, rumah ibadah, atau ruang komunal, tetapi juga mencakup strategi sosial-ekologis untuk mendekatkan sumber pangan kepada konsumen, memperpendek rantai pasok, memperkuat partisipasi komunitas, serta meningkatkan resiliensi pangan rumah tangga (Giyarsih, Armansyah, Zaelany, Latifa, Setiawan, Saputra, Haqi, Lamijo, et al., 2024; Ilieva et al., 2022; Nowysz et al., 2022). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa urban agriculture dapat meningkatkan akses terhadap pangan segar, mendukung diversifikasi konsumsi, mengurangi sebagian beban pengeluaran rumah tangga, memperkuat modal sosial, dan berkontribusi pada pembangunan kota yang lebih berkelanjutan (Abdoellah, Suparman, et al., 2023; Colson-Fearon & Versey, 2022; Pradhan et al., 2024). Dalam konteks Indonesia, praktik urban farming juga telah dikaji sebagai strategi pemberdayaan masyarakat, penguatan ketahanan pangan rumah tangga, dan pemanfaatan lahan terbatas di perkotaan, sebagaimana terlihat dalam studi mengenai urban farming di Bandung, Surakarta, Gresik, dan wilayah urban lainnya (Abdoellah, Wulandari, et al., 2023; Giyarsih, Armansyah, Zaelany, Latifa, Setiawan, Saputra, Haqi, Lamijo, et al., 2024; Haikal et al., 2025).

Meskipun demikian, urban farming tidak dapat diposisikan secara romantik sebagai solusi tunggal bagi seluruh persoalan pangan kota. Literatur menunjukkan bahwa kontribusi urban farming sangat dipengaruhi oleh skala implementasi, ketersediaan lahan, keberlanjutan partisipasi masyarakat, dukungan kelembagaan, kualitas pendampingan teknis, keamanan pangan, serta integrasinya dengan kebijakan pangan dan tata ruang kota (Alkhaja et al., 2025; Galli et al., 2024; Giyarsih, Armansyah et al., 2024). Dengan demikian, urban farming lebih tepat dipahami sebagai strategi komplementer dalam sistem pangan kota, bukan sebagai pengganti penuh distribusi pangan regional dan nasional. Dalam perspektif kebijakan publik, keberhasilan urban farming bergantung pada kemampuan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan program pertanian perkotaan dengan agenda ketahanan pangan, pengendalian inflasi, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan lingkungan, dan perencanaan pembangunan wilayah (Hasson, 2025; Nigus et al., 2024; Sulistiyani et al., 2026). Integrasi kebijakan menjadi penting karena persoalan pangan perkotaan bersifat lintas sektor dan tidak dapat diselesaikan melalui program sektoral yang terfragmentasi.

Kota Bandar Lampung merupakan konteks yang relevan untuk dikaji karena posisinya sebagai kota besar, pusat aktivitas ekonomi Provinsi Lampung, sekaligus wilayah urban dengan tekanan konsumsi pangan yang tinggi. Data resmi menunjukkan bahwa Bandar Lampung menghadapi dinamika inflasi yang perlu dicermati; BPS Kota Bandar Lampung mencatat inflasi bulanan sebesar 0,18% pada Januari 2026 dan inflasi tahunan sebesar 1,43%, dengan beberapa komoditas pangan seperti beras, kangkung, bayam, cabai, bawang merah, dan jeruk muncul dalam dinamika penyumbang inflasi maupun deflasi bulanan. Pemerintah

Kota Bandar Lampung melalui TPID juga menaruh perhatian pada stabilitas harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, khususnya pada komoditas cabai, bawang merah, daging ayam, telur, minyak goreng, dan gula pasir. Selain itu, peta Food Security and Vulnerability Atlas menunjukkan pentingnya informasi spasial dalam mengidentifikasi wilayah rentan pangan berdasarkan aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan, sehingga kebijakan pangan daerah perlu disusun berbasis data dan prioritas wilayah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan ketahanan pangan di Bandar Lampung bukan hanya berkaitan dengan kecukupan pasokan, tetapi juga keterjangkauan, stabilitas harga, kerentanan rumah tangga, dan kapasitas pemerintah kota dalam membangun sistem pangan yang lebih adaptif.

Pada saat yang sama, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah memiliki embrio program urban farming melalui kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi dan penguatan Kelompok Wanita Tani. Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung melaporkan kegiatan monitoring dan panen sayuran di KWT Kedamaian Jaya dalam program P2B, yang bertujuan meningkatkan gizi dan pendapatan keluarga melalui pemanfaatan pekarangan untuk budidaya hortikultura dan komoditas pangan. Fakta ini menunjukkan bahwa urban farming telah hadir dalam praktik kebijakan daerah, tetapi masih perlu ditingkatkan dari kegiatan sektoral menjadi kebijakan kota yang lebih terintegrasi, berbasis wilayah prioritas, dan memiliki indikator kinerja yang terukur. Dengan kata lain, persoalan utama bukan semata-mata ketiadaan program, melainkan belum optimalnya integrasi antara urban farming, ketahanan pangan rumah tangga, pengendalian inflasi pangan, pemberdayaan komunitas, serta tata kelola lintas perangkat daerah. Tanpa integrasi tersebut, urban farming berisiko berhenti sebagai program seremonial, bantuan bibit sesaat, atau kegiatan komunitas yang dampaknya sulit diukur secara sistematis (Guo et al., 2021; Hu & Xu, 2025; Onyango et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, gap penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang secara spesifik menganalisis urban farming di Bandar Lampung sebagai instrumen kebijakan publik yang terintegrasi dengan ketahanan pangan kota, pengendalian inflasi pangan, dan intervensi berbasis wilayah rentan. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas urban farming dari sisi pemberdayaan masyarakat, kontribusi terhadap konsumsi rumah tangga, keberlanjutan lingkungan, atau praktik komunitas di kota-kota tertentu, tetapi belum banyak yang menempatkan urban farming sebagai strategi kebijakan lintas sektor dalam tata kelola ketahanan pangan perkotaan berbasis data kerentanan wilayah (Colson-Fearon & Versey, 2022; Gunapala et al., 2025; Toku et al., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penguatan urban farming sebagai instrumen ketahanan pangan perkotaan, mengidentifikasi masalah prioritas yang menghambat optimalisasi urban farming, mengevaluasi alternatif kebijakan yang paling layak diterapkan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, berbasis wilayah prioritas, dan berorientasi pada peningkatan akses pangan segar, resiliensi rumah tangga, serta stabilitas pangan kota.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan desain analisis kebijakan berbasis studi dokumen. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk menguji hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan untuk memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi strategi kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penguatan urban farming sebagai instrumen ketahanan pangan perkotaan. Desain kualitatif digunakan untuk menelaah isu ketahanan pangan secara kontekstual, terutama dalam hubungannya dengan dinamika inflasi pangan, kerentanan rumah tangga perkotaan, keterbatasan akses terhadap pangan segar, serta posisi urban farming dalam sistem kebijakan pangan kota. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan urban farming bukan semata-mata sebagai praktik budidaya tanaman di ruang perkotaan, tetapi sebagai bagian dari intervensi kebijakan publik yang berkaitan dengan tata kelola pangan, pemberdayaan masyarakat, pengendalian kerentanan sosial-ekonomi, dan pembangunan kota berkelanjutan.

Data penelitian diperoleh melalui penelusuran dan analisis data sekunder yang bersumber dari dokumen statistik, dokumen kebijakan, laporan perangkat daerah, regulasi nasional, serta literatur ilmiah yang relevan. Dokumen statistik meliputi data Badan Pusat Statistik tentang jumlah penduduk, kemiskinan, pengeluaran rumah tangga, dan perkembangan inflasi pangan di Kota Bandar Lampung. Dokumen kebijakan dan kelembagaan meliputi Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA), dokumen Dinas Pangan Kota Bandar Lampung, dokumen Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung, informasi resmi Pemerintah Kota Bandar Lampung, serta regulasi nasional yang berkaitan dengan pangan, ketahanan pangan dan gizi, sistem budidaya pertanian berkelanjutan, dan penganeekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan artikel ilmiah bereputasi yang membahas urban farming, urban agriculture, ketahanan pangan perkotaan, sistem pangan kota, resiliensi pangan, dan integrasi kebijakan

publik. Literatur ilmiah dipilih berdasarkan relevansi konseptual dan metodologis, dengan prioritas pada artikel jurnal terkini, artikel terindeks, dan sumber yang memiliki identitas publikasi serta DOI yang dapat diverifikasi. Literatur klasik tetap digunakan secara terbatas apabila memiliki kontribusi konseptual yang kuat, misalnya dalam menjelaskan definisi urban agriculture, dimensi ketahanan pangan, dan kerangka sistem pangan perkotaan.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahap analitis yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah identifikasi isu kebijakan dengan menelaah kondisi ketahanan pangan Kota Bandar Lampung, terutama terkait ketergantungan rumah tangga perkotaan pada pasokan pasar, tekanan inflasi pangan, dan adanya wilayah prioritas rentan pangan berdasarkan dokumen FSVA. Tahap kedua adalah pemetaan aktor dan kebijakan dengan mengidentifikasi peran pemerintah kota, perangkat daerah, kelompok masyarakat, Kelompok Wanita Tani, serta program-program yang telah berjalan dalam penguatan urban farming dan pemanfaatan pekarangan. Tahap ketiga adalah sintesis literatur untuk membangun dasar teoretis mengenai hubungan urban farming dengan ketahanan pangan, akses pangan segar, resiliensi rumah tangga, pemberdayaan komunitas, dan keberlanjutan lingkungan perkotaan. Tahap keempat adalah analisis prioritas masalah dengan menggunakan kerangka USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth, untuk menentukan masalah yang paling mendesak, paling serius, dan paling berpotensi berkembang apabila tidak segera ditangani. Melalui tahapan ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan persoalan, tetapi juga menyusun dasar argumentatif bagi pemilihan alternatif kebijakan yang paling relevan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui proses reduksi data, kategorisasi tematik, interpretasi kebijakan, dan penarikan simpulan. Data dari dokumen statistik dan kebijakan direduksi untuk memilih informasi yang berhubungan langsung dengan isu ketahanan pangan, urban farming, inflasi pangan, akses pangan rumah tangga, dan prioritas wilayah. Selanjutnya, data dikategorikan ke dalam beberapa tema utama, yaitu kerentanan pangan perkotaan, ketergantungan terhadap pasar, potensi urban farming, dukungan kelembagaan, integrasi lintas sektor, serta kelayakan alternatif kebijakan. Setelah itu, penelitian menggunakan kerangka Avoid-Shift-Improve untuk membaca arah strategi kebijakan. Aspek avoid digunakan untuk menganalisis bagaimana urban farming dapat mengurangi kerentanan rumah tangga terhadap fluktuasi harga dan gangguan pasokan pangan. Aspek shift digunakan untuk menilai perlunya perubahan orientasi program dari bantuan sesaat menuju sistem produksi pangan rumah tangga dan komunitas yang lebih berkelanjutan. Adapun aspek improve digunakan untuk menilai kebutuhan perbaikan tata kelola, pendampingan teknis, indikator kinerja, dan integrasi urban farming ke dalam kebijakan ketahanan pangan kota.

Evaluasi alternatif kebijakan dilakukan dengan membandingkan empat opsi utama, yaitu program bantuan bibit pekarangan secara terbatas, pengembangan kebun komunitas dan urban farming kelurahan, integrasi urban farming dengan kebijakan ketahanan pangan kota, serta pengembangan urban farming berbasis ekonomi sirkular. Keempat alternatif tersebut dinilai berdasarkan empat aspek kelayakan, yaitu aspek ekonomi, sosial, politik, dan teknis. Aspek ekonomi digunakan untuk menilai potensi kebijakan dalam mengurangi beban pengeluaran pangan rumah tangga, membuka peluang ekonomi lokal, dan mendukung stabilisasi komoditas pangan tertentu. Aspek sosial digunakan untuk menilai tingkat penerimaan masyarakat, potensi partisipasi komunitas, serta kontribusi terhadap pemberdayaan kelompok lokal seperti KWT, PKK, sekolah, dan kelurahan. Aspek politik digunakan untuk menilai kesesuaian alternatif dengan agenda pemerintah daerah, peluang dukungan kelembagaan, dan kemudahan integrasi ke dalam kebijakan kota. Sementara itu, aspek teknis digunakan untuk menilai kesiapan sumber daya, kebutuhan pendampingan, ketersediaan lahan, kemudahan pelaksanaan, dan potensi keberlanjutan program. Hasil evaluasi kemudian digunakan untuk menentukan alternatif kebijakan yang paling layak dan paling strategis bagi konteks Kota Bandar Lampung.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari dokumen statistik, dokumen kebijakan pemerintah daerah, regulasi nasional, dan literatur ilmiah. Triangulasi ini dilakukan untuk mengurangi bias interpretasi dan memastikan bahwa argumentasi kebijakan tidak hanya bertumpu pada satu jenis sumber. Selain itu, validitas analisis diperkuat melalui keterlacakan data, konsistensi antara masalah, kerangka teori, hasil analisis, dan rekomendasi kebijakan, serta penggunaan sumber-sumber resmi dan akademik yang dapat diverifikasi. Karena penelitian ini berbasis studi dokumen dan tidak melibatkan wawancara langsung dengan informan, maka analisis tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan pengalaman subjektif seluruh aktor kebijakan, melainkan untuk menyusun telaah kebijakan berbasis bukti sekunder. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini perlu dipahami sebagai analisis kebijakan konseptual-empiris yang dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan melalui wawancara

mendalam, observasi lapangan, atau evaluasi program berbasis data primer pada tingkat rumah tangga, komunitas, dan perangkat daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kerentanan Daya Beli Rumah Tangga terhadap Fluktuasi Harga Pangan

Hasil analisis menunjukkan bahwa ketahanan pangan rumah tangga di Kota Bandar Lampung sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga pangan pokok. Kerentanan tersebut terutama dirasakan oleh rumah tangga berpendapatan rendah yang sebagian besar kebutuhan pangannya dipenuhi melalui mekanisme pasar. Dalam konteks perkotaan, ketergantungan terhadap pasar menjadi persoalan penting karena rumah tangga tidak memiliki kontrol langsung terhadap harga, distribusi, dan ketersediaan komoditas pangan. Ketika harga pangan meningkat, kelompok rentan cenderung melakukan penyesuaian konsumsi, baik dengan mengurangi jumlah konsumsi, mengganti jenis pangan dengan alternatif yang lebih murah, maupun menurunkan kualitas pangan yang dikonsumsi.

Tabel 1. Dampak Fluktuasi Harga Pangan terhadap Daya Beli Rumah Tangga di Bandar Lampung (2024)

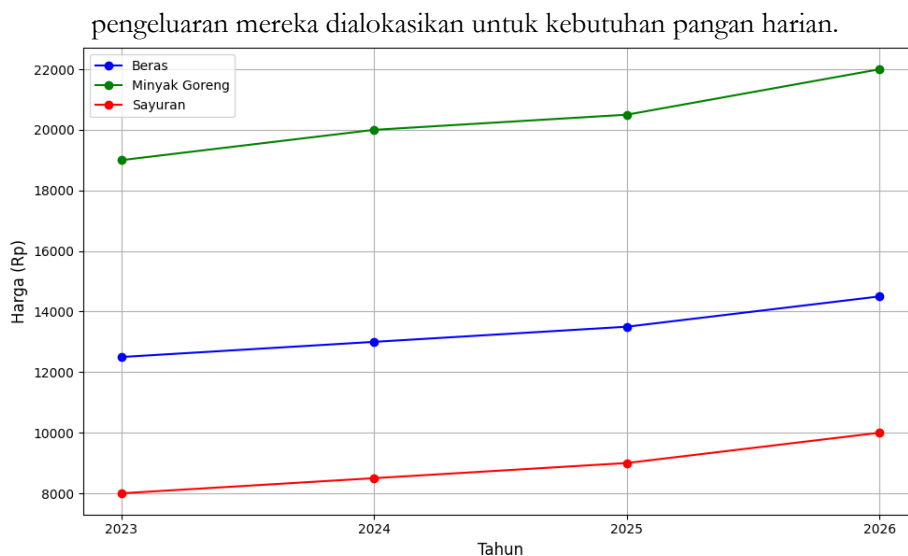
Jenis Pangan	Harga Rata-Rata (Rp/kg)	Kenaikan Harga (%)	Dampak terhadap Rumah Tangga Miskin
Beras	12.5	10%	Mengurangi konsumsi atau mengganti dengan alternatif lebih murah
Minyak goreng	19	15%	Menurunkan kualitas konsumsi dan beralih ke produk dengan harga lebih rendah
Sayur-sayuran	8	20%	Mengurangi frekuensi konsumsi sayuran segar
Daging ayam	40	12%	Mengurangi konsumsi protein hewani dan beralih ke protein nabati

Tabel 1 memperlihatkan bahwa kenaikan harga paling tinggi terjadi pada komoditas sayur-sayuran, yaitu sebesar 20%, diikuti minyak goreng sebesar 15%, daging ayam sebesar 12%, dan beras sebesar 10%. Temuan ini penting karena sayur-sayuran, beras, minyak goreng, dan daging ayam merupakan komoditas yang berkaitan langsung dengan konsumsi harian rumah tangga. Kenaikan harga sayur-sayuran berpotensi mengurangi konsumsi pangan segar, sedangkan kenaikan harga daging ayam dapat menurunkan akses rumah tangga miskin terhadap protein hewani. Dengan demikian, fluktuasi harga tidak hanya berdampak pada pengeluaran ekonomi rumah tangga, tetapi juga pada kualitas gizi dan keragaman konsumsi pangan.

Dalam perspektif ketahanan pangan, temuan tersebut menunjukkan bahwa akses pangan rumah tangga perkotaan sangat rentan terhadap dinamika harga pasar. Rumah tangga miskin tidak selalu mengalami kekurangan pangan dalam arti ketiadaan makanan, tetapi dapat mengalami penurunan kualitas konsumsi akibat keterbatasan daya beli. Oleh karena itu, masalah ketahanan pangan di Kota Bandar Lampung perlu dipahami sebagai persoalan keterjangkauan dan stabilitas akses pangan, bukan semata-mata persoalan ketersediaan pangan di pasar. Kondisi ini memperkuat urgensi pengembangan urban farming sebagai sumber pangan tambahan yang dapat membantu rumah tangga memperoleh sebagian komoditas segar secara lebih dekat, murah, dan berkelanjutan.

### Tren Fluktuasi Harga Pangan Pokok Tahun 2024–2026

Selain berdampak pada daya beli rumah tangga, fluktuasi harga pangan juga menunjukkan kecenderungan yang perlu diantisipasi secara kebijakan. Gambar 1 memperlihatkan adanya perubahan harga pangan pokok selama periode 2024–2026. Pergerakan harga yang tidak stabil menunjukkan bahwa rumah tangga perkotaan berada dalam situasi yang rentan terhadap tekanan inflasi pangan. Dalam konteks ini, kelompok berpendapatan rendah menjadi pihak yang paling terdampak karena sebagian besar



Gambar 1. Fluktuasi Harga Pangan Pokok di Bandar Lampung (2024–2026)

Gambar 1 mengindikasikan bahwa harga pangan pokok tidak bergerak secara linear, melainkan mengalami kenaikan dan penurunan yang dipengaruhi oleh dinamika pasokan, musim, distribusi, serta tekanan pasar. Komoditas yang memiliki karakter mudah rusak, seperti sayuran dan cabai, umumnya lebih rentan mengalami perubahan harga dibandingkan komoditas yang dapat disimpan lebih lama. Kondisi ini berdampak langsung pada pola konsumsi rumah tangga karena pangan segar merupakan komponen penting dalam pemenuhan gizi keluarga. Ketika harga pangan segar meningkat, rumah tangga miskin cenderung mengurangi frekuensi pembelian atau menggantinya dengan bahan pangan yang lebih murah tetapi belum tentu memiliki kualitas gizi yang setara.

Temuan pada Gambar 1 memperkuat hasil pada Tabel 1 bahwa ketahanan pangan perkotaan tidak dapat dilepaskan dari stabilitas harga. Urban farming menjadi relevan karena dapat berfungsi sebagai mekanisme penyangga pada tingkat rumah tangga dan komunitas. Meskipun urban farming tidak dapat menggantikan seluruh kebutuhan pangan kota, praktik ini dapat membantu menyediakan komoditas tertentu, terutama sayuran daun, rempah, cabai, dan tanaman hortikultura berumur pendek. Dengan demikian, urban farming dapat memperkuat akses pangan segar sekaligus mengurangi sebagian tekanan belanja pangan rumah tangga.

### Dampak Gangguan Pasokan terhadap Ketersediaan Pangan

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di Kota Bandar Lampung rentan terhadap gangguan pasokan. Gangguan tersebut dapat bersumber dari faktor alam, kebijakan impor, maupun tekanan inflasi global. Ketergantungan kota terhadap pasokan dari luar wilayah menyebabkan sistem pangan perkotaan mudah terdampak ketika terjadi hambatan distribusi atau kenaikan biaya logistik. Kondisi ini menegaskan bahwa sistem pangan kota tidak hanya membutuhkan pasokan yang cukup, tetapi juga mekanisme adaptasi yang dapat mengurangi ketergantungan penuh terhadap pasar eksternal.

Tabel 2. Dampak Gangguan Pasokan Pangan terhadap Ketersediaan Pangan di Bandar Lampung

Jenis Gangguan Pasokan	Dampak terhadap Pasokan Pangan	Persentase Pengurangan Ketersediaan Pangan
Bencana alam	Menghambat distribusi pangan	30%
Krisis impor	Membatasi pasokan bahan pangan tertentu	25%
Inflasi global	Meningkatkan harga pangan	20%

Tabel 2 menunjukkan bahwa bencana alam memiliki dampak paling besar terhadap pengurangan ketersediaan pangan, yaitu sebesar 30%. Hal ini dapat dipahami karena bencana alam berpotensi menghambat transportasi, merusak infrastruktur distribusi, dan menunda pengiriman pangan dari daerah produksi ke wilayah konsumsi. Krisis impor menempati posisi kedua dengan dampak sebesar 25%, terutama pada komoditas yang sebagian pasokannya bergantung pada pasar luar daerah atau luar negeri. Sementara itu, inflasi global memberikan dampak sebesar 20% melalui kenaikan harga komoditas dan biaya distribusi.

Temuan ini memperlihatkan bahwa ketahanan pangan Kota Bandar Lampung perlu dibangun melalui pendekatan resiliensi. Artinya, kebijakan pangan tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme pasar, tetapi juga harus memperkuat kapasitas lokal dalam menghadapi gangguan. Urban farming dapat menjadi salah satu strategi adaptasi karena memungkinkan sebagian kebutuhan pangan segar diproduksi pada skala rumah tangga, komunitas, sekolah, maupun kelurahan. Produksi lokal skala kecil ini memang tidak dapat menutup seluruh kebutuhan pangan kota, tetapi dapat mengurangi kerentanan pada komoditas tertentu, terutama komoditas hortikultura yang sering mengalami fluktuasi harga dan pasokan.

### Evaluasi Alternatif Kebijakan Urban Farming

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, penelitian ini mengevaluasi empat alternatif kebijakan yang dapat diterapkan dalam penguatan urban farming di Kota Bandar Lampung. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan empat aspek utama, yaitu ekonomi, sosial, politik, dan teknis. Aspek ekonomi berkaitan dengan potensi kebijakan dalam menekan pengeluaran rumah tangga dan membuka peluang ekonomi lokal. Aspek sosial berkaitan dengan penerimaan masyarakat, partisipasi komunitas, dan pemberdayaan kelompok lokal. Aspek politik berkaitan dengan dukungan kelembagaan, kesesuaian dengan prioritas pemerintah daerah, dan peluang integrasi lintas perangkat daerah. Adapun aspek teknis berkaitan dengan kesiapan sumber daya, kemudahan implementasi, kebutuhan pendampingan, dan keberlanjutan program.

Tabel 3. Evaluasi Alternatif Kebijakan

Alternatif Kebijakan	Ekonomi	Sosial	Politik	Teknis	Total
Bantuan bibit pekarangan secara terbatas	4	3	4	5	16
Kebun komunitas/urban farming kelurahan	4	5	4	4	17
Integrasi urban farming dengan kebijakan ketahanan pangan kota	5	5	5	4	19
Urban farming berbasis ekonomi sirkular	4	5	4	3	16

Tabel 3 menunjukkan bahwa alternatif kebijakan dengan skor tertinggi adalah integrasi urban farming dengan kebijakan ketahanan pangan kota, dengan total skor 19. Alternatif ini memperoleh skor tinggi pada aspek ekonomi, sosial, dan politik karena dinilai paling mampu menghubungkan kebutuhan rumah tangga, partisipasi masyarakat, dan agenda pemerintah daerah dalam satu kerangka kebijakan yang lebih sistematis. Dari aspek ekonomi, integrasi kebijakan berpotensi mengurangi sebagian beban belanja pangan rumah tangga dan memperkuat produksi pangan segar skala lokal. Dari aspek sosial, kebijakan ini dapat melibatkan KWT, PKK, sekolah, kelurahan, dan komunitas warga sebagai aktor pelaksana. Dari aspek politik, integrasi urban farming dengan kebijakan ketahanan pangan kota lebih mudah memperoleh legitimasi karena sejalan dengan agenda pengendalian inflasi, pengurangan kerentanan pangan, dan pembangunan kota berkelanjutan.

Alternatif kebun komunitas atau urban farming kelurahan memperoleh skor 17 dan menempati posisi kedua. Alternatif ini kuat secara sosial karena mampu mendorong gotong royong, pembelajaran bersama, dan pemanfaatan lahan komunal. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi partisipasi warga, ketersediaan lahan, dan pendampingan teknis. Sementara itu, bantuan bibit pekarangan secara terbatas dan urban farming berbasis ekonomi sirkular masing-masing memperoleh skor 16. Bantuan bibit relatif mudah dilaksanakan secara teknis, tetapi dampaknya cenderung terbatas apabila tidak disertai pendampingan dan evaluasi berkelanjutan. Adapun urban farming berbasis ekonomi sirkular memiliki nilai inovatif karena menghubungkan produksi pangan dengan pengelolaan sampah organik, tetapi membutuhkan kesiapan teknis yang lebih tinggi, terutama dalam pengolahan kompos, manajemen produksi, dan pemasaran hasil.

Berdasarkan evaluasi tersebut, pilihan kebijakan paling strategis untuk Kota Bandar Lampung adalah integrasi urban farming dengan kebijakan ketahanan pangan kota. Alternatif ini tidak hanya menawarkan solusi teknis budidaya, tetapi juga menyediakan kerangka tata kelola yang lebih kuat. Dengan integrasi kebijakan, urban farming dapat diarahkan pada wilayah prioritas berdasarkan data kerentanan pangan, dihubungkan dengan program pengendalian inflasi daerah, didukung oleh perangkat daerah terkait, serta diukur melalui indikator kinerja yang lebih jelas.

### Pembahasan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan rumah tangga di Kota Bandar Lampung terutama dipengaruhi oleh tingginya ketergantungan masyarakat perkotaan terhadap pasokan pasar, fluktuasi harga pangan, gangguan distribusi, serta belum optimalnya integrasi urban farming ke dalam

kebijakan ketahanan pangan kota. Hasil analisis dalam naskah memperlihatkan bahwa urban farming memiliki potensi strategis untuk memperkuat akses pangan segar, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada desain kebijakan yang terintegrasi, berbasis wilayah prioritas, didukung lintas perangkat daerah, dan memiliki indikator evaluasi yang terukur. Temuan ini sejalan dengan Zezza & Tasciotti (2010), yang menegaskan bahwa urban agriculture di negara berkembang dapat membantu rumah tangga miskin mengurangi kerentanan pangan melalui produksi sebagian kebutuhan pangan sendiri. Namun, penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menekankan bahwa manfaat urban farming di Bandar Lampung tidak cukup dipahami pada level rumah tangga, tetapi perlu dinaikkan menjadi instrumen kebijakan kota yang terhubung dengan pengendalian inflasi pangan, pemanfaatan data FSVA, dan intervensi berbasis kelurahan prioritas.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan Galhena et al. (2013), yang menunjukkan bahwa home gardens dapat meningkatkan diversifikasi pangan, memperbaiki akses terhadap pangan segar, dan mendukung kesejahteraan rumah tangga. Dalam konteks Bandar Lampung, urban farming berpotensi memainkan peran yang sama, khususnya untuk komoditas hortikultura berumur pendek seperti sayuran, cabai, rempah, dan tanaman pangan pekarangan. Akan tetapi, berbeda dari studi Galhena et al. yang lebih banyak menekankan kontribusi kebun rumah tangga terhadap gizi dan kesejahteraan keluarga, penelitian ini menemukan bahwa persoalan utama bukan hanya bagaimana rumah tangga menanam, tetapi bagaimana pemerintah kota membangun sistem pendampingan, dukungan sarana produksi, kelembagaan pelaksana, serta mekanisme monitoring agar urban farming tidak berhenti sebagai kegiatan sporadis. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan hubungan antara praktik pekarangan produktif dan tata kelola kebijakan pangan perkotaan.

Hasil penelitian ini juga menguatkan argumen de Gunapala et al. (2025) dan Orsini et al. (2013), yang menempatkan urban agriculture sebagai bagian dari strategi resiliensi kota dalam menghadapi tekanan pangan, perubahan lingkungan, dan kerentanan sosial-ekonomi. Temuan di Bandar Lampung menunjukkan bahwa fluktuasi harga dan gangguan pasokan pangan dapat memperlemah akses rumah tangga terhadap pangan sehat, sehingga urban farming dapat berfungsi sebagai mekanisme penyangga lokal. Namun, penelitian ini juga menegaskan bahwa urban farming tidak boleh diposisikan sebagai solusi tunggal yang menggantikan sistem distribusi pangan regional dan nasional. Urban farming lebih tepat dipahami sebagai strategi komplementer yang memperkuat akses pangan segar pada tingkat rumah tangga, komunitas, sekolah, dan kelurahan. Dengan posisi ini, urban farming tidak dibebani target yang terlalu besar, tetapi diarahkan secara realistis untuk mengurangi sebagian ketergantungan terhadap pasar pada komoditas tertentu.

Jika dibandingkan dengan penelitian Wulandari et al. (2023) mengenai urban home gardening di Bandung dan Barokah et al. (2023) mengenai kontribusi urban farming terhadap ketahanan pangan rumah tangga di Surakarta, penelitian ini memiliki titik temu pada pentingnya pemanfaatan pekarangan, partisipasi komunitas, dan peningkatan akses pangan segar. Namun, penelitian ini berbeda karena tidak hanya menilai urban farming sebagai praktik rumah tangga atau komunitas, tetapi sebagai alternatif kebijakan publik yang dievaluasi berdasarkan aspek ekonomi, sosial, politik, dan teknis. Dalam konteks Bandar Lampung, alternatif terbaik bukan sekadar bantuan bibit atau kebun komunitas, melainkan integrasi urban farming dengan kebijakan ketahanan pangan kota. Perbedaan ini penting karena banyak program urban farming di daerah cenderung kuat pada aspek kegiatan, tetapi lemah dalam integrasi kelembagaan, indikator kinerja, dan kesinambungan program.

Temuan penelitian ini juga relevan dengan Giyarsih et al. (2024), yang menunjukkan bahwa urban farming dapat menjadi solusi alternatif terhadap persoalan pangan dan lingkungan akibat urbanisasi di Indonesia. Urbanisasi membuat kota semakin padat, lahan semakin terbatas, dan rumah tangga semakin bergantung pada pangan dari luar wilayah. Dalam konteks Bandar Lampung, persoalan serupa terlihat melalui besarnya kebutuhan konsumsi penduduk perkotaan, tekanan harga pangan, dan adanya kelurahan prioritas rentan pangan. Namun, penelitian ini memberikan tekanan berbeda dengan menempatkan FSVA sebagai basis penentuan wilayah intervensi. Dengan demikian, pengembangan urban farming tidak seharusnya dilakukan secara merata tanpa prioritas, tetapi diarahkan terlebih dahulu pada kelurahan yang memiliki kerentanan pangan lebih tinggi, keterbatasan akses pangan, atau kelompok rumah tangga rentan yang lebih besar.

Temuan penelitian ini turut memperkuat pandangan Candel & Biesbroek (2016) mengenai pentingnya policy integration dalam menangani masalah publik yang kompleks dan lintas sektor. Ketahanan pangan kota tidak hanya menjadi urusan dinas pangan atau dinas pertanian, tetapi juga berkaitan dengan pengendalian inflasi, pemberdayaan masyarakat, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, tata ruang, dan

ekonomi lokal. Oleh karena itu, urban farming di Bandar Lampung perlu dikelola melalui kolaborasi lintas OPD, kelurahan, KWT, PKK, sekolah, komunitas warga, dan aktor ekonomi lokal. Temuan ini sekaligus memperlihatkan kelemahan pendekatan sektoral: jika urban farming hanya dijalankan sebagai pembagian bibit atau kegiatan seremonial, dampaknya terhadap ketahanan pangan rumah tangga sulit diukur dan keberlanjutannya cenderung lemah.

Dibandingkan dengan Tapia et al. (2021), yang menekankan perlunya kerangka indikator untuk memantau kontribusi urban agriculture terhadap keberlanjutan kota, penelitian ini menemukan kebutuhan serupa dalam konteks Bandar Lampung. Indikator keberhasilan urban farming tidak cukup diukur dari jumlah bibit yang dibagikan, jumlah polybag, atau jumlah kelompok yang mengikuti pelatihan. Indikator yang lebih substantif perlu mencakup jumlah rumah tangga yang aktif menanam, volume produksi pangan segar, penghematan belanja pangan rumah tangga, keberlanjutan kebun komunitas, keterlibatan kelurahan prioritas, serta kontribusi terhadap stabilisasi komoditas pangan tertentu. Dengan indikator tersebut, urban farming dapat dievaluasi sebagai kebijakan ketahanan pangan, bukan sekadar program penghijauan atau pemberdayaan masyarakat jangka pendek.

Kebaruan penelitian ini terletak pada cara memosisikan urban farming sebagai instrumen kebijakan publik terintegrasi dalam sistem ketahanan pangan kota, bukan sekadar praktik pertanian rumah tangga atau kegiatan komunitas. Penelitian ini menggabungkan analisis kerentanan pangan perkotaan, tekanan inflasi pangan, gangguan pasokan, data wilayah prioritas, serta evaluasi alternatif kebijakan dalam satu kerangka argumentatif. Novelty lainnya adalah penggunaan perspektif integrasi kebijakan untuk menunjukkan bahwa penguatan urban farming di Bandar Lampung harus diarahkan pada desain lintas sektor, berbasis kelurahan prioritas, berorientasi pada pengendalian kerentanan rumah tangga, dan didukung indikator kinerja yang terukur. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini bukan hanya pada isu urban farming, tetapi juga pada pengembangan model tata kelola pangan perkotaan yang lebih adaptif, terarah, dan kontekstual bagi pemerintah daerah.

Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah perluasan pemahaman tentang urban farming dari konsep agronomis menuju konsep kebijakan publik perkotaan. Urban farming tidak hanya dipahami sebagai kegiatan produksi pangan di ruang terbatas, tetapi sebagai bagian dari urban food system, resiliensi sosial, pemberdayaan ekonomi lokal, dan integrasi kebijakan lintas sektor. Implikasi praktisnya adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu menggeser orientasi program dari bantuan input menuju kebijakan yang lebih sistemik melalui pemetaan wilayah prioritas, penguatan kelembagaan KWT dan PKK, kolaborasi antar-OPD, pendampingan teknis berkelanjutan, serta evaluasi berbasis indikator dampak. Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah perlunya regulasi atau kebijakan wali kota yang secara khusus menghubungkan urban farming dengan ketahanan pangan, pengendalian inflasi pangan, pemanfaatan pekarangan, ekonomi sirkular, dan pembangunan kota berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui secara eksplisit. Pertama, penelitian ini berbasis data sekunder dan analisis dokumen, sehingga belum menangkap pengalaman langsung rumah tangga, kelompok wanita tani, perangkat daerah, maupun komunitas pelaksana urban farming. Kedua, beberapa data kuantitatif mengenai dampak fluktuasi harga dan gangguan pasokan masih perlu diverifikasi lebih lanjut melalui sumber statistik resmi atau survei lapangan agar dapat memperkuat validitas empiris. Ketiga, evaluasi alternatif kebijakan dilakukan melalui penilaian analitis berdasarkan aspek ekonomi, sosial, politik, dan teknis, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan dinamika implementasi aktual di lapangan. Keempat, penelitian ini belum mengukur secara langsung kontribusi urban farming terhadap penghematan belanja pangan, peningkatan konsumsi sayur, perubahan status ketahanan pangan rumah tangga, atau stabilisasi harga komoditas tertentu. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan menggunakan wawancara mendalam, observasi lapangan, survei rumah tangga, dan analisis dampak program agar kontribusi urban farming terhadap ketahanan pangan Kota Bandar Lampung dapat diukur secara lebih empiris dan komprehensif.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan urban farming di Kota Bandar Lampung perlu diposisikan sebagai strategi kebijakan publik yang terintegrasi dalam sistem ketahanan pangan perkotaan, bukan sekadar program sektoral berbasis bantuan bibit atau kegiatan penghijauan komunitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketahanan pangan rumah tangga perkotaan di Bandar Lampung menghadapi tekanan yang kompleks akibat tingginya ketergantungan pada pasokan pasar, fluktuasi harga pangan, gangguan distribusi, peningkatan kebutuhan penduduk urban, serta keberadaan wilayah-wilayah

prioritas rentan pangan. Dalam konteks tersebut, urban farming memiliki potensi strategis untuk memperkuat akses rumah tangga terhadap pangan segar, mengurangi sebagian beban pengeluaran pangan, meningkatkan resiliensi sosial-ekonomi komunitas, dan mendukung agenda pengendalian inflasi pangan daerah. Hasil evaluasi alternatif kebijakan menunjukkan bahwa pilihan paling layak adalah integrasi urban farming dengan kebijakan ketahanan pangan kota karena mampu menghubungkan aspek ekonomi, sosial, politik, dan teknis dalam satu desain kebijakan yang lebih sistematis, berbasis wilayah prioritas, dan berorientasi pada dampak. Secara teoretis, penelitian ini memperluas pemahaman urban farming dari praktik budidaya perkotaan menjadi instrumen tata kelola pangan kota yang berkaitan dengan resiliensi, akses pangan, integrasi kebijakan, dan pembangunan berkelanjutan. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Kota Bandar Lampung memperkuat regulasi, koordinasi lintas perangkat daerah, pendampingan teknis masyarakat, penguatan KWT/PKK/kelurahan, serta indikator kinerja yang terukur seperti jumlah rumah tangga aktif menanam, produksi pangan segar, penghematan belanja pangan, dan cakupan wilayah prioritas. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena masih berbasis data sekunder dan analisis dokumen, sehingga penelitian lanjutan perlu melibatkan wawancara mendalam, observasi lapangan, survei rumah tangga, serta evaluasi dampak program untuk mengukur kontribusi urban farming secara lebih empiris terhadap ketahanan pangan, kualitas konsumsi, dan kesejahteraan rumah tangga perkotaan di Bandar Lampung.

## REFERENSI

- Abdoellah, O. S., Suparman, Y., Safitri, K. I., Basagevan, R. M., Fianti, N. D., Wulandari, I., & Husodo, T. (2023). Food Security of Urban Agricultural Households in the Area of North Bandung, West Java, Indonesia. *Sustainability*, 15(24), 16683. <https://doi.org/10.3390/su152416683>
- Abdoellah, O. S., Wulandari, I., Safitri, K. I., Fianti, N. D., Basagevan, R. M. F., Aini, M. N., Amalia, R. I., Suraloka, M. P. A., & Utama, G. L. (2023). Urban Agriculture in Great Bandung Region in the Midst of Commercialization, Food Insecurity, and Nutrition Inadequacy. *Sustainability*, 15(13), 10241. <https://doi.org/10.3390/su151310241>
- Alkhaja, N., Alawadi, K., Almemari, K., & Alshehhi, G. (2025). How is urban agriculture practiced, institutionalized, implemented, and sustained? A literature review. *Progress in Planning*, 192, 100917. <https://doi.org/10.1016/j.progress.2024.100917>
- Antriyandarti, E., Barokah, U., Rahayu, W., Laia, D. H., & Asami, A. (2023). Factors Associated with Food Security of Dryland Farm Households in the Karst Mountains of Gunungkidul Indonesia. *Sustainability*, 15(11), 8782. <https://doi.org/10.3390/su15118782>
- Barokah, U., Rahayu, W., & Antriyandarti, E. (2023). The Role of Urban Farming to Household Food Security in the Surakarta City, Indonesia. *Agrisociomics: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 7(3), 526–538. <https://doi.org/10.14710/agrisociomics.v7i3.15942>
- Bird, Z., Iese, V., Des Combes, H. J., Alungo, B., & Wairiu, M. (2023). Assessing rural household's food groups-and-sources and dietary diversity pattern in Malaita Province. *Scientific Reports*, 13(1), 13251. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-39124-3>
- Candel, J. J. L., & Biesbroek, R. (2016). Toward a Processual Understanding of Policy Integration. *Policy Sciences*, 49(3), 211–231. <https://doi.org/10.1007/s11077-016-9248-y>
- Chen, X., & Yu, G. (2024). The Impact of Urban–Rural Integration on Food Security: Evidence from Provincial Panel Data in China. *Sustainability*, 16(9), 3815. <https://doi.org/10.3390/su16093815>
- Colson-Fearon, B., & Versey, H. S. (2022). Urban Agriculture as a Means to Food Sovereignty? A Case Study of Baltimore City Residents. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(19), 12752. <https://doi.org/10.3390/ijerph191912752>
- Dumisa, B. M., Sibanda, M., & Khumalo, N. Z. (2025). Determinants of Household Food Insecurity Among Urban Small-Scale Crop Farmers in Sub-Saharan Africa Region: A Systematic Literature Review. *Sustainability*, 17(22), 9999. <https://doi.org/10.3390/su17229999>
- Engler-Stringer, R. (2023). Food Security. In *Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research* (pp. 2559–2561). Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-17299-1\\_1073](https://doi.org/10.1007/978-3-031-17299-1_1073)
- FAO, IFAD, UNICEF, W. and W. (2025). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2025 (SOFI)*. European Commission.
- FAO. (2025). *The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) Report*. World Health Organization.
- Galanakis, C. M., Daskalakis, M. I., Galanakis, I., Gallo, A., Marino, E. A. E., Chalkidou, A., & Agrafioti, E. (2025). A systematic framework for understanding food security drivers and their interactions. *Discover Food*, 5(1), 178. <https://doi.org/10.1007/s44187-025-00480-w>
- Galhena, D. H., Freed, R., & Maredia, K. M. (2013). Home gardens: a promising approach to enhance household food security and wellbeing. *Agriculture & Food Security*, 2(1), 8. <https://doi.org/10.1186/2048-7010-2-8>

- Galli, F., Arcuri, S., Belletti, G., Marescotti, A., Moretti, M., & Rovai, M. (2024). Integrating Local Food Policies and Spatial Planning to Enhance Food Systems and Rural–Urban Links: A Living Lab Experiment. *Land*, 13(12), 2014. <https://doi.org/10.3390/land13122014>
- Giyarsih, S. R., Armansyah, Zaelany, A. A., Latifa, A., Setiawan, B., Saputra, D., Haqi, M., Fathurohman, A., & Lamijo. (2024). The contribution of urban farming to urban food security: the case of “Buruan SAE.” *International Journal of Urban Sustainable Development*, 16(1), 262–281. <https://doi.org/10.1080/19463138.2024.2384876>
- Giyarsih, S. R., Armansyah, Zaelany, A. A., Latifa, A., Setiawan, B., Saputra, D., Haqi, M., Lamijo, & Fathurohman, A. (2024). Interrelation of urban farming and urbanization: an alternative solution to urban food and environmental problems due to urbanization in Indonesia. *Frontiers in Built Environment*, 9. <https://doi.org/10.3389/fbuil.2023.1192130>
- Gunapala, R., Gangahagedara, R., Wanasinghe, W. C. S., Samaraweera, A. U., Gamage, A., Rathnayaka, C., Hameed, Z., Baki, Z. A., Madhujith, T., & Merah, O. (2025). Urban agriculture: A strategic pathway to building resilience and ensuring sustainable food security in cities. *Farming System*, 3(3), 100150. <https://doi.org/10.1016/j.farsys.2025.100150>
- Guo, T., García-Martín, M., & Plieninger, T. (2021). Recognizing indigenous farming practices for sustainability: a narrative analysis of key elements and drivers in a Chinese dryland terrace system. *Ecosystems and People*, 17(1), 279–291. <https://doi.org/10.1080/26395916.2021.1930169>
- Haikal, R., Firdaus, T., Herdiansyah, H., & Chairunnisa, R. S. (2025). Urban Planning Policies and Architectural Design for Sustainable Food Security: A Case Study of Smart Cities in Indonesia. *Sustainability*, 17(16), 7546. <https://doi.org/10.3390/su17167546>
- Haile Aboye, B., Gebre-Egziabher, T., & Kebede, B. (2024). Peri-urban food insecurity and coping strategies among farm households in the face of rapid urbanization in Sub-Saharan Africa: Evidence from Ethiopia. *Research in Globalization*, 8, 100200. <https://doi.org/10.1016/j.resglo.2024.100200>
- Hasson, A. (2025). Democratic Processes in Urban Agriculture: A Comparative Analysis of Community Gardens and Allotments in London. *Land*, 14(12), 2395. <https://doi.org/10.3390/land14122395>
- Herawati, D. M. D., Megawati, G., & Wijayakesuma, A. (2025). Food Sources of Protein to Overcome Malnutrition and Infectious Diseases: Indonesian Aspects. In *Handbook of Public Health Nutrition* (pp. 1–24). Springer Nature Switzerland. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-32047-7\\_37-1](https://doi.org/10.1007/978-3-031-32047-7_37-1)
- Hu, Z., & Xu, J. (2025). How Does the Risk of Returning to Poverty Emerge Among Poverty-Alleviated Populations in the Post-Poverty Era? A Livelihood Space Perspective. *Sustainability*, 17(11), 5079. <https://doi.org/10.3390/su17115079>
- Ilieva, R. T., Cohen, N., Israel, M., Specht, K., Fox-Kämper, R., Fargue-Lelièvre, A., Ponížy, L., Schoen, V., Caputo, S., Kirby, C. K., Goldstein, B., Newell, J. P., & Blythe, C. (2022). The Socio-Cultural Benefits of Urban Agriculture: A Review of the Literature. *Land*, 11(5), 622. <https://doi.org/10.3390/land11050622>
- Lundberg, K., Moragues-Faus, A., Thornton, L., Cohen, N., Diekmann, L., & De Regil, L. M. (2025). Paving the way: Urban Health, Food Systems, and the Imperative for Holistic City-Led Action. *F1000Research*, 14, 513. <https://doi.org/10.12688/f1000research.163042.1>
- Nations, F. and A. O. of the U., Development, I. F. for A., Fund, U. N. C., Health, W. F. P. & W., & Organization. (n.d.). The state of food security and nutrition in the world 2025. In 2025. Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://doi.org/https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/cd6008en>
- Nigus, G., Ketema, M., Haji, J., & Sileshi, M. (2024). Determinants of adoption of urban agricultural practices in eastern Haraghe zone of Oromia region and Dire Dawa City administration, eastern Ethiopia. *Heliyon*, 10(4), e26758. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e26758>
- Nowysz, A., Mazur, Ł., Vaverková, M. D., Koda, E., & Winkler, J. (2022). Urban Agriculture as an Alternative Source of Food and Water Security in Today’s Sustainable Cities. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(23), 15597. <https://doi.org/10.3390/ijerph192315597>
- Onyango, E., Otoadese, D., Mori, K., Chinedu-Asogwa, N., Kiplagat, J., & Jirel, B. (2025). Exploring neighborhood transformations and community gardens to meet the cultural food needs of immigrants and refugees: A scoping review. *Health & Place*, 92, 103433. <https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2025.103433>
- Orsini, F., Kahane, R., Nono-Womdim, R., & Gianquinto, G. (2013). Urban agriculture in the developing world: a review. *Agronomy for Sustainable Development*, 33(4), 695–720. <https://doi.org/10.1007/s13593-013-0143-z>
- Pérez-Escamilla, R. (2024). Food and nutrition security definitions, constructs, frameworks, measurements, and applications: global lessons. *Frontiers in Public Health*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1340149>
- Pradhan, P., Subedi, D. R., Dahal, K., Hu, Y., Gurung, P., Pokharel, S., Kafle, S., Khatri, B., Basyal, S., Gurung, M., & Joshi, A. (2024). Urban agriculture matters for sustainable development. *Cell Reports Sustainability*, 1(9), 100217. <https://doi.org/10.1016/j.crsus.2024.100217>
- Saada Reuveni. (2025). The Role of Food Prices and Market Access in Contributing to Hunger in Low-Income Populations. *Eximia*, 14(1), 69–96. <https://doi.org/10.47577/eximia.v14i1.531>

- Sulistiyani, A. T., Sutarno, S., Setyono, P., Wahyunengseh, R. D., & Elista, A. (2026). Contribution of green village to food security in the Yogyakarta special region. *Discover Sustainability*, 7(1), 397. <https://doi.org/10.1007/s43621-025-02259-6>
- Sumsion, R. M., June, H. M., & Cope, M. R. (2023). Measuring Food Insecurity: The Problem with Semantics. *Foods*, 12(9), 1816. <https://doi.org/10.3390/foods12091816>
- Tapia, C., Randall, L., Wang, S., & Aguiar Borges, L. (2021). Monitoring the Contribution of Urban Agriculture to Urban Sustainability: An Indicator-Based Framework. *Sustainable Cities and Society*, 74, 103130. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.103130>
- Toku, A., Twumasi Amoah, S., & Nyabanyi N-yanbini, N. (2024). Exploring the potentials of urban crop farming and the question of environmental sustainability. *City and Environment Interactions*, 24, 100167. <https://doi.org/10.1016/j.cacint.2024.100167>
- Touch, V., Tan, D. K. Y., Cook, B. R., Liu, D. L., Cross, R., Tran, T. A., Utomo, A., Yous, S., Grunbuhel, C., & Cowie, A. (2024). Smallholder farmers' challenges and opportunities: Implications for agricultural production, environment and food security. *Journal of Environmental Management*, 370, 122536. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.122536>
- WULANDARI, I., HUSODO, T., MULYANTO, D., ABDOELLAH, O. S., AMALIA, C. A., & FARHANIAH, S. S. (2023). Supporting food security through urban home gardening, Rancasari Sub-district, Bandung City, West Java, Indonesia. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 24(10). <https://doi.org/10.13057/biodiv/d241043>
- Zeza, A., & Tasciotti, L. (2010). Urban agriculture, poverty, and food security: Empirical evidence from a sample of developing countries. *Food Policy*, 35(4), 265–273. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2010.04.007>